

Analisis Dampak Multisektor Kebijakan Larangan Study Tour di Jawa Barat

Ai Siti Farida¹, Annasha Zelda²

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Email Korespondensi : aisitifarida@uinsgd.ac.id, annashazelda01@gmail.com

Keywords: <i>public policy, study tour ban, contextual learning, local economy, MSMEs student transportation safety, multiplesStreams framework</i>	Abstract: <i>This study aims to analyze the impact of the study tour ban policy issued by the West Java Provincial Government. The research uses a descriptive qualitative approach based on document studies, scientilic literature, and statistical data. Findings indicate that although the policy was enacted to ensure student safety, its implementation unintentionally affected other sectors. Local MSMEs and tourism actors suffered up to 45% revenue loss, 22 travel agents ceased operations, and 133 school principals faced administrative sanctions due to policy implementation confusion. In the educational context, students lost access to contextual learning experiences, which are proven to improve knowledge retention by up to 75%. Using Public Policy, Policy Cycle, and Multiple Streams Framework as analytical lenses, the study reveals weaknesses in the policy formulation and evaluation phases, with no inclusive alternative solutions provided. The study recommends technical improvements through clear operational guidelines and the development of substitute programs that support both educational and local economic values.</i>
Kata Kunci: <i>kebijakan publik, larangan study tour, pengalaman belajar kontekstual, ekonomi lokal, UMKM, keselamatan transportasi pelajar, Multiple Streams Framework</i>	Abstrak: <i>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan larangan study tour yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi dokumen, literatur ilmiah, dan data statistik. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini diambil sebagai upaya perlindungan terhadap keselamatan siswa, dampaknya justru menyentuh berbagai sektor lain yang belum terantisipasi dengan baik. UMKM dan pelaku wisata lokal mengalami penurunan omzet hingga 45%, 22 agen travel menghentikan operasional, dan 133 kepala sekolah terkena sanksi administratif karena kebingungan dalam implementasi kebijakan. Dari sisi pendidikan, siswa kehilangan akses terhadap pembelajaran kontekstual dan pengalaman edukatif yang terbukti meningkatkan retensi pengetahuan hingga 75%. Dengan menganalisis kebijakan ini melalui pendekatan Public Policy, Policy Cycle, dan Multiple Streams Framework, ditemukan bahwa fase perumusan kebijakan dan evaluasi masih lemah, serta tidak dibarengi solusi alternatif yang inklusif. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan teknis berupa pedoman operasional yang jelas serta pengembangan program pengganti yang mendukung nilai edukatif dan ekonomi lokal.</i>

Pendahuluan

Kegiatan *study tour* merupakan bagian dari pendekatan pembelajaran kontekstual yang diharapkan mampu meningkatkan pengalaman belajar siswa secara langsung di luar ruang kelas. Dalam berbagai literatur pendidikan, kegiatan ini dipercaya memperkuat keterampilan sosial, kemandirian, dan pemahaman lintas bidang melalui pengalaman lapangan yang konkret. Hal ini sejalan dengan amanat Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang mendorong kegiatan belajar bersifat kontekstual, serta didukung oleh Permendikbud No. 24 Tahun 2007 yang mengakomodasi pembelajaran di luar kelas sebagai bagian dari upaya pencapaian kompetensi siswa.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan *study tour* di berbagai daerah kerap menimbulkan persoalan baru, terutama terkait aspek keselamatan, biaya, dan pengawasan kegiatan. Ketidakesesuaian antara idealisasi pembelajaran kontekstual dengan realitas pelaksanaannya menjadikan kegiatan ini rawan menimbulkan eksese negatif, baik secara individual maupun sosial. Kondisi ini semakin diperparah dengan sejumlah insiden kecelakaan yang melibatkan rombongan pelajar, seperti tergambar dalam data berikut :

Tabel 1. Data Kecelakaan Bus Pelajar

Tahun	Lokasi & Rutin Kegiatan	Korban Meninggal	Korban Luka
2020	Bus PO Purnama Sari di Bandung–Subang	–	–
2021	Bus SMPIT Al Muawwanah Subang	29	–
2022	Bus MTs Darul Fallah Cijati	1	57
2024	Bus SMK Lingga Kencana Depok	11	-

Sumber: Detik.com, KlikAnggaran.com, TribunNews.com, dan Kompas.id. Diolah Peneliti (2025)

Banyaknya masalah sebagai akibat kegiatan *study tour* menjadi perhatian serius di Jawa Barat. Tragedi paling memprihatinkan terjadi pada 11 Mei 2024, yaitu kecelakaan bus SMK Lingga Kencana Depok di Subang yang menewaskan 11 siswa dan 1 guru (KNKT,

2024). Selain itu, data terbaru menunjukkan bahwa yang melibatkan pelajar meningkat tajam, dengan 191 insiden pada tahun 2023 dan 69 peristiwa hingga Mei 2024 (Kompas, 2024). Temuan ini memperkuat bahwa kegiatan *study tour* belum mengintegrasikan berbagai aspek teknis secara memadai di Jawa Barat, sehingga tetap jauh dari ideal, bahkan cenderung berbahaya dan merugikan berbagai aspek.

Tabel 2. Tanggapan Masyarakat Pelarangan *Study Tour*

Tanggapan	Persentase
Setuju	57,9%
Tidak Setuju	31,8%
Tidak Berkomentar	10,3%

Sumber: Merdeka.com. Diolah Peneliti (2025)

Dalam aspek ekonomi, Rinalis pada orang tua semakin membebani. Survei Forum Orang Tua Jawa Barat menunjukkan bahwa rata-rata biaya *study tour* mencapai Rp 1,8 juta per siswa, dan 30% orang tua merasa terbebani (Kompasiana, 2025). Akibatnya, banyak pihak menyarankan penghapusan kegiatan ini dari kurikulum pendidikan (Amal, dkk., 2022). Hal ini tentu menarik perhatian pemerintah untuk ikut turun tangan.

Sebagai respons, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Edaran Gubernur No. 45/PK.03/03/Kesra Tahun 2025 yang melarang seluruh bentuk *study tour* di berbagai jenjang pendidikan. Regulasi ini diterapkan sebagai pengganti dari 64/PK.01/Kesra Tahun 2024 Tentang *Study Tour* Pada Satuan Pendidikan yang ditandatangani Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin dengan isi bahwa sekolah harus perhatikan aspek keselamatan dan kelaikan bus. Perubahan kebijakan yang tegas ini tentu menimbulkan banyak pro dan kontra dimasyarakat.

Tabel 3. Penyebab Kecelakaan Bus

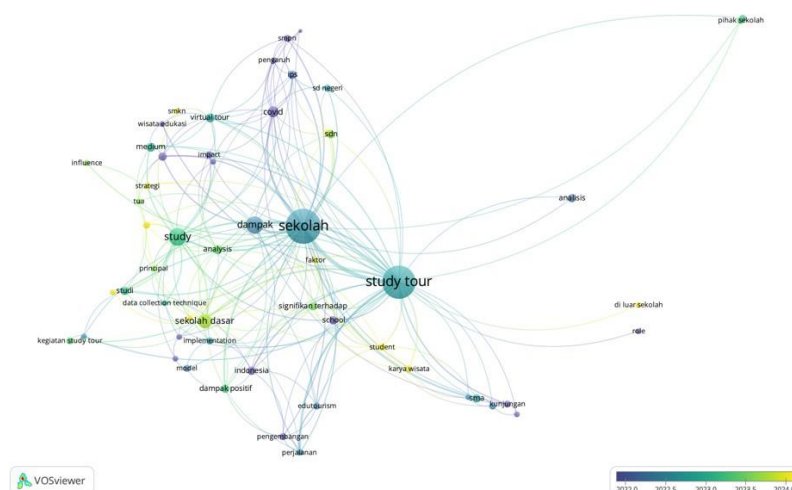
Penyebab	Persentase
Sistem Rem	46%
Aspek Manusia	38%
Lingkungan	15%

Sumber: Kompas.com. Diolah Peneliti (2025)

Banyak pihak menyoroti bahwa regulasi tersebut terlalu luas dan tidak tepat sasaran karena tidak mengatasi akar permasalahan seperti keselamatan teknis, model pendanaan, dan sistem pengawasan. DPR RI melalui Komisi V menilai kebijakan pelarangan *study tour* tidak menysasar inti permasalahan, yaitu kelayakan kendaraan dan manajemen pelaksanaan, sehingga dinilai keliru karena menyalahkan program dan siswa, bukan akar penyebabnya (Sjaifudian, 2024). Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mencatat setidaknya 13 kecelakaan bus pariwisata dari tahun 2018 hingga Mei 2024, yang disebabkan oleh kegagalan sistem rem, faktor manusia, dan kondisi lingkungan.

Kajian tentang dampak *study tour* sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Priskilla Elisabet Saing & Junita Yosephine Sinurat (2024) menemukan bahwa *study tour* bukan sekadar rekreasi, tapi punya manfaat edukatif yang konkret apabila dirancang dengan baik. Oktavianus dkk. (2024) menegaskan bahwa *study tour* tak hanya kegiatan siswa, tetapi juga saluran nilai ekonomi ekonomi lokal. Dari berbagai penelitian terdahulu, belum ada yang meneliti secara spesiRik terhadap dampak pelarangan *study tour*. Sehingga hal ini bisa menjadi *research gap* yang akan diisi oleh penelitian ini.

Gambar 1. Analisis Bibliometrik



Sumber: VOSViewer. Diolah Peneliti (2025)

Hasil *software* VOSviewer menunjukkan visualisasi mengenai penelitian terkait *study tour* masih banyak terhadap kata kunci "*sekolah*" "*study tour*," serta "*sekolah dasar*". Sementara penelitian terkait larangan kegiatan serta dampaknya masih belum ditemui. Maka dari itu, hal tersebut menjadi *novelty* yang membedakan penelitian ini dengan yang terdahulu.

Penelitian ini bermaksud mengidentifikasi dampak kebijakan pelarangan ini, tidak hanya untuk dari perspektif keselamatan dan orang tua, tetapi memperhatikan aspek-aspek lain yang tidak tersorot. Sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan dan mencegah dampak negatif pada bidang lain.

Tinjauan Literatur

Public Policy

Kebijakan publik adalah rangkaian keputusan yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah untuk menjawab masalah-masalah bersama di masyarakat (Hamidah, 2020). Dalam kasus larangan *study tour* oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kebijakan ini diambil sebagai respons cepat terhadap tragedi kecelakaan yang melibatkan rombongan pelajar. Sayangnya, pendekatan yang digunakan terlihat lebih reaktif ketimbang reflektif dengan mengambil jalan pintas melalui pelarangan total, ketimbang mengevaluasi akar permasalahan seperti kelalaian operator transportasi, pengawasan dari sekolah, atau minimnya standar keselamatan perjalanan pendidikan. Ini mencerminkan lemahnya fase perencanaan dan pengkajian mendalam terhadap kebijakan publik yang berdampak luas (Sudrajat, Syah, & Erihadiana, 2021).

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyadari bahwa kebijakan bukan sekadar dokumen larangan, tapi juga instrumen pembangunan nilai dan solusi jangka panjang. Ketika hanya berhenti pada pelarangan tanpa penyediaan alternatif, hal ini menunjukkan lemahnya keberlanjutan dalam *policy design*. Evaluasi kebijakan yang minim pascaimplementasi juga menandakan kegagalan dalam memfungsikan tahap monitoring dalam siklus kebijakan publik. Sebagaimana dikatakan Dunn (2018), monitoring adalah elemen vital dalam memahami apakah kebijakan memberi dampak

sebagaimana diharapkan atau justru menciptakan eksternalitas negatif baru. Jika hal ini tidak segera diperbaiki, kebijakan semacam ini hanya akan menjadi simbol reaksi sesaat yang kehilangan relevansi dan legitimasi publik dalam jangka panjang.

Policy Cycle

Teori *Policy Cycle* merupakan pendekatan sistematis dalam menganalisis kebijakan publik melalui enam tahapan utama: identifikasi masalah, perumusan kebijakan, legitimasi, implementasi, evaluasi, dan terminasi (Nugroho, 2018). Pendekatan ini menekankan pentingnya kesinambungan proses dalam setiap siklus kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya responsif, tapi juga efektif dan kontekstual. Dalam konteks pelanggaran *study tour* di Jawa Barat, bisa dilihat bahwa tahapan implementasi kebijakan berlangsung cepat, sementara fase identifikasi masalah dan formulasi cenderung diabaikan atau tidak terstruktur. Padahal, pemetaan masalah seharusnya melibatkan identifikasi aktor, kepentingan, serta akar penyebab seperti buruknya manajemen transportasi wisata, bukan hanya sekadar menyetop kegiatannya.

Evaluasi kebijakan menjadi salah satu tahapan yang paling sering terabaikan dalam praktik kebijakan publik di (AlRikri et dkk., 2025). Studi Ndari, Suroso, dan Pramudiana (2023) menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan pariwisata lokal banyak disebabkan oleh tidak adanya siklus evaluasi yang berkelanjutan. Hal yang sama terlihat dalam kasus *study tour*, di mana kebijakan larangan muncul secara reaktif pascakecelakaan tanpa proses *monitoring* dan *review* atas kebijakan sebelumnya. Nugroho (2018), menjelaskan bahwa absennya evaluasi seringkali membuat kebijakan bersifat jangka pendek dan berpotensi merusak ekosistem lain yang belum dianalisis, seperti sektor UMKM, pariwisata lokal, dan pembelajaran siswa. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengkaji bagaimana *Policy Cycle* bisa diterapkan secara penuh dan sistematis dalam evaluasi pelanggaran *study tour* tersebut.

Multiple Streams Framework

Multiple Streams Framework (MSF) menjelaskan bahwa kebijakan lahir saat tiga aliran yaitu *problem*, *policy*, dan *politics* bertemu dalam satu jendela peluang (Kingdon, 2011). Dalam konteks kebijakan pelanggaran *study tour* di Jawa Barat, *problem stream* memang sangat kuat yaitu kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa menciptakan

kepanikan dan tekanan publik, sehingga isu tersebut segera masuk radar pengambil kebijakan (Sudrajat, Syah, & Erihadiana, 2021). Namun, pada aspek *policy stream*, yaitu solusi teknis atau alternatif kebijakan, terlihat jelas bahwa pemerintah tidak cukup menyiapkan skema pengganti seperti penyusunan standar keamanan perjalanan, kurikulum pengalaman belajar di luar kelas yang lebih aman, atau kolaborasi dengan sektor pariwisata pendidikan. *Problem* muncul dan direspons, tetapi solusi yang terstruktur dan tepat sasaran masih jauh dari tuntas.

Di sisi lain, *politics stream* yaitu dukungan politik dan opini publik juga tidak secara jelas terbaca atau dimobilisasi. Sekolah dan guru berada dalam kebingungan, orang tua tidak diberikan ruang partisipatif, dan pelaku usaha lokal seperti agen travel maupun UMKM merasa terabaikan. Akibatnya, dukungan publik merespons ketakutan jangka pendek tanpa ada rasa kepemilikan atas kebijakan tersebut (RRI, 2025). Dalam perspektif *MSF*, ini artinya jendela peluang kebijakan memang sempit terbuka, namun tidak digunakan untuk merancang solusi jangka panjang yang inklusif. Ketiadaan mekanisme deliberatif atau partisipasi luas menutup kemungkinan integrasi antar-stream secara menyeluruh.

Implikasi dari ketidakseimbangan antar aliran dalam *MSF* ini cukup serius. Tanpa adanya *policy stream* dan dukungan politik yang keberlanjutan, kebijakan hanya berakhir sebagai simbol respons cepat tanpa daya tahan implementatif. Pengalaman belajar siswa hilang, pelaku usaha terpuruk, dan sekolah kehilangan kejelasan arah kebijakan (Sudrajat, Syah, & Erihadiana, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini perlu mendorong pemahaman bahwa kebijakan seharusnya dibentuk dari interaksi sinergis antara kebutuhan nyata, solusi teknis yang matang, dan dukungan politik yang partisipatif.

Metode Penelitian

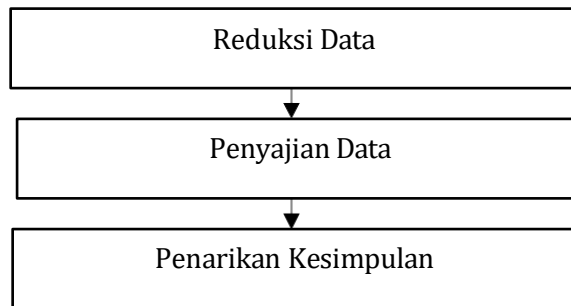
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen dan kajian literatur karena dianggap paling tepat untuk memahami fenomena kebijakan secara mendalam dalam konteks sosial dan administratif. Pendekatan ini sesuai dengan panduan dalam metodologi penelitian sosial yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap konstruksi sosial dalam kebijakan publik (Dalglish dkk., 2020). Studi dokumen

dalam konteks kebijakan juga memungkinkan peneliti untuk menganalisis dinamika sosial yang kompleks tanpa intervensi langsung di lapangan (Wesley, 2010).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, termasuk surat edaran pemerintah, laporan investigasi resmi, statistik kecelakaan, dan artikel ilmiah yang relevan, sesuai dengan pendekatan sistematis seperti yang dijelaskan dalam pendekatan *READ (Ready, Extract, Analyse, Distil)* (Dalglish dkk., 2020). Dengan pendekatan ini, informasi yang dikaji tidak hanya bersifat normatif tetapi juga mencerminkan kondisi faktual di lapangan (Ji, 2024).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis isi yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini sangat relevan untuk menilai substansi kebijakan, aktor yang terlibat, serta konteks sosial tempat kebijakan diterapkan (Morgan, 2022).

Tabel 4. Alur Penelitian



Sumber: Word. Diolah Peneliti (2025)

Hasil Penelitian

Dampak Terhadap Ekonomi Lokal dan *Travel Agent*

Tabel 5. Kasus Kerugian Pariwisata

Kasus	Kerugian
Hotel & Restoran	18 event (4.300 pax)
UMKM Pariwisata	Penurunan Omzet 45%
PO Bus	50% Pembatalan
Desa Wisata	Penurunan Pendaang Hingga 45%

Sumber : Detik.com, Kompas.co.id, KabarSunda.com. Diolah Peneliti (2025)

Data menunjukkan bahwa kebijakan larangan study tour di Jawa Barat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pelaku ekonomi lokal, terutama di sektor pariwisata dan jasa transportasi. Berdasarkan data yang diolah peneliti, warung makan dan restoran di kawasan wisata mengalami penurunan omzet hingga 45% pada April 2025. Selain itu, terdapat 18 event dengan total sekitar 4.300 peserta yang dibatalkan, yang berdampak langsung pada pelaku usaha mikro, operator bus, dan desa wisata (Detik.com, Kompas.co.id, KabarSunda.com, 2025).

Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata mencatat bahwa banyak agen travel di daerah Sumedang terpaksa mengurangi operasional karena menurunnya jumlah pelanggan (Radar Bandung, 2025). Hal ini memperkuat indikasi bahwa sektor pariwisata edukatif terganggu secara signifikan akibat kebijakan tersebut.

Kebingungan Implementasi di Tingkat Sekolah

Tabel 6. Kasus Kerugian Pariwisata

Kasus Pelanggaran	Jumlah
SMA	111
SMK	22

Sumber : IDNTimes.com. Diolah Peneliti (2025)

Kebijakan ini juga menimbulkan kebingungan dalam implementasi di lapangan. Data yang diolah peneliti berdasarkan laporan IDNTimes (2025) menunjukkan bahwa terdapat 133 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh sekolah, terdiri dari 111 SMA dan 22 SMK. Banyak sekolah tidak memahami batasan antara study tour yang dilarang dan kunjungan edukatif yang diperbolehkan (Tempo.co, 2025).

Selain itu, laporan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat mengindikasikan bahwa sejumlah kepala sekolah diberi sanksi administratif karena dianggap melanggar Surat Edaran Gubernur. Salah satu kasus yang mencuat adalah pencopotan Kepala SMAN 6 Depok, meskipun kegiatan dilakukan dengan persetujuan komite dan orang tua (Kompas.com, 2025).

Hilangnya *Experience Learning*

Tabel 7. Pentingnya *Experience Learning*

Indikator	Peningkatan
Retensi pengetahuan	75 %
Kemampuan berpikir kritis & pemecahan masalah	65 %
Motivasi dan keterlibatan siswa	60 %

Sumber : GitnuxReport. Diolah Peneliti (2025)

Pembatalan kegiatan study tour juga berdampak pada aspek pedagogis. Protes dari siswa tidak hanya bersifat emosional, tetapi menunjukkan terganggunya proses *experience learning*. Berdasarkan data GitnuxReport yang diolah peneliti (2025), *experience learning* berkontribusi terhadap peningkatan retensi pengetahuan (75%), kemampuan berpikir kritis (65%), dan motivasi siswa (60%).

Pembahasan

Problem Stream

Dalam kerangka *Multiple Streams Framework* (Kingdon, 2011), *problem stream* pada kasus ini sangat kuat. Lonjakan kasus kecelakaan bus pariwisata yang membawa siswa, serta keresahan orang tua terkait biaya yang tinggi, menjadi pemicu utama dikeluarkannya kebijakan larangan study tour (Kompas.co.id, 2025; DetikTravel, 2025). Tekanan publik yang tinggi menciptakan kebutuhan mendesak untuk mengambil keputusan cepat, dan hal ini menjadi bukti bahwa pengambil kebijakan merespons tekanan tersebut secara reaktif. Problem yang nyata ini telah berhasil masuk ke agenda kebijakan karena sifatnya yang darurat dan mendapatkan perhatian luas dari masyarakat dan media.

Namun demikian, dari perspektif teori kebijakan publik, proses ini menunjukkan kecenderungan formulasi kebijakan yang hanya menekankan tahap identifikasi masalah tanpa melalui formulasi kebijakan yang menyeluruh maupun penilaian dampak lanjutan (Linder & Peters, 1989). Strategi penanggulangan risiko kecelakaan yang terburu-buru justru menciptakan efek domino negatif, terutama terhadap pelaku ekonomi lokal yang sebelumnya bergantung pada sektor wisata edukatif, seperti kios, pengrajin cinderamata, dan jasa transportasi.

Policy Stream

Meski problem stream sangat kuat, *policy stream* dalam kebijakan ini justru lemah. Tidak terlihat adanya penyusunan solusi alternatif yang komprehensif, seperti pengembangan pedoman keselamatan perjalanan, seleksi ketat terhadap penyedia jasa transportasi, atau kebijakan pengganti kegiatan pembelajaran luar kelas yang lebih aman (Nugroho, 2025). Padahal, pendekatan kebijakan yang berorientasi pada solusi teknis semestinya dirancang untuk menjamin keberlanjutan fungsi edukatif yang sebelumnya dijalankan melalui study tour.

Akibat dari lemahnya *policy stream* ini, pelaksanaan kebijakan di lapangan mengalami kebingungan yang signifikan. Sekolah tidak mendapat petunjuk teknis yang jelas, dan pelaku pendidikan menjadi ragu dalam mengambil inisiatif (Tempo.co, 2025). Bahkan, guru dan kepala sekolah tidak dapat membedakan antara *study tour* yang

dilarang dan kunjungan edukatif yang masih diperbolehkan. Hal ini menjadi indikator kegagalan pada tahap implementasi dalam siklus kebijakan (Howlett & Ramesh, 2003), yang ditandai dengan inkonsistensi pelaksanaan di berbagai sekolah yang sebagian tetap melanjutkan kegiatan, sementara sebagian lain membatalkannya sepenuhnya tanpa pertimbangan pedagogis.

Ihwal ini memperlihatkan perlunya evaluasi sistematis terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan. Tanpa kejelasan petunjuk teknis dan jalur konsultasi, sekolah akan terus mengalami penurunan kreativitas, kecemasan dalam pelaksanaan, serta ketidakefektifan dalam mencapai tujuan kebijakan (Hill & Hupe, 2014). Maka, dibutuhkan revisi terhadap prosedur operasional standar dan pelatihan teknis bagi pelaksana kebijakan di tingkat daerah.

Politics Stream

Politics stream dalam konteks ini juga tidak berjalan optimal. Tidak ada mobilisasi dukungan politik yang melibatkan aktor-aktor utama seperti kepala sekolah, guru, orang tua, atau pelaku industri pariwisata edukatif. Tidak terdapat proses deliberatif atau pelibatan publik yang bisa memperkuat legitimasi kebijakan sejak awal pembentukan. Sebaliknya, terjadi resistensi dan kebingungan dari berbagai pihak, serta muncul sanksi administratif yang memicu kontroversi (IDNTimes, 2025; Kompas.com, 2025).

Dalam hal ini, kurangnya partisipasi publik dan tidak terbentuknya koalisi pendukung kebijakan menunjukkan lemahnya aspek politik dari MSF. Kebijakan kehilangan basis dukungan sosial yang seharusnya menopang pelaksanaannya. Pelaku usaha wisata pendidikan seperti agen travel, restoran, hingga UMKM lokal pun merasa tidak diberi ruang untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut (Radar Bandung, 2025). Di sisi lain, siswa juga kehilangan hak atas pengalaman belajar langsung yang telah terbukti meningkatkan retensi hingga 40% serta mengasah soft skills seperti kerja sama, kemandirian, dan kedewasaan sosial (Kompasiana, 2025).

Hal ini memperjelas ketimpangan antara *problem stream* yang sangat kuat dengan lemahnya *policy* dan *politics stream*. Dalam kerangka MSF, ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diputuskan secara reaktif dan sepihak berisiko besar kehilangan daya tahan, serta berpotensi digantikan kembali tanpa solusi konkret

berbasis bukti (Kingdon, 2011). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyertakan *political coalition dan evidence-based alternatives* dalam setiap kebijakan publik yang menyangkut khususnya di dunia Pendidikan.

Kesimpulan

Kebijakan larangan *study tour* di Jawa Barat sebenarnya merupakan langkah yang muncul dari keinginan masyarakat untuk mencegah risiko keselamatan, serta menata ulang kegiatan pendidikan agar tidak hanya menjadi ajang wisata konsumtif. Namun demikian, dalam praktiknya, kebijakan ini memiliki dampak campuran. Terdapat membawa niat baik dan diterima sebagai bentuk perhatian terhadap keselamatan siswa, namun di sisi lain menimbulkan persoalan baru seperti ketidakpastian implementasi, kerugian sektor ekonomi wisata dan UMKM, serta hilangnya ruang pembelajaran kontekstual yang selama ini hanya bisa diperoleh melalui model *experience learning*. Artinya, kebijakan ini belum sepenuhnya matang dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta belum dibarengi dengan skema pengganti yang adaptif untuk menutupi kekosongan dari sisi pendidikan dan ekonomi.

Rekomendasi

Perlu dilakukan pembenahan dalam desain teknis kebijakan, utamanya dalam memberikan panduan jelas terkait batasan kegiatan yang dilarang dan yang masih diizinkan, disertai komunikasi yang terstruktur ke semua satuan pendidikan. Pemerintah daerah dapat mengembangkan program alternatif seperti edukasi berbasis wisata lokal, *virtual Kield trip*, hingga kolaborasi dengan destinasi wisata edukatif untuk mengadakan program pembelajaran tematik yang aman dan terjangkau. Di sisi lain, sektor pariwisata dan UMKM perlu dilibatkan secara aktif melalui pelibatan mereka dalam perencanaan kebijakan, sehingga mitigasi dampak ekonominya bisa lebih konkret. Dengan pendekatan kebijakan yang responsif dan kolaboratif ini, diharapkan kebijakan larangan *study tour* dapat tetap membawa nilai publik tanpa harus mengorbankan aspek pendidikan maupun ekonomi lokal.

Daftar Pustaka

- ARikri, M. Y., Arnisiyi, U., Azizah, Y. N., Noerikhsan, S., Mawaddah, N., & Hakim, A. T. (2025). Evaluasi kebijakan publik: Pengertian, teori dan karakteristik. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 29–33. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.316>
- Amal, B. K., Rambe, T., Ampera, D., Purba, A. S., & Ridho, H. (2022). Parents' perceptions of children's education and parents' attitudes towards the education of Rishermen's children. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, dan Agama*, 8(1), 85–97.
- CNN Indonesia. (2025, Maret 26). Dilarang Dedi Mulyadi, apa itu study tour? CNN Indonesia. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250326154545-269-1213364/dilarang-dedi-mulyadi-apa-itu-study-tour>
- DalGLISH, S. L., Khalid, H., & McMahon, S. (2020). Document analysis in health policy research: The READ approach. *Health Policy and Planning*. <https://doi.org/10.1093/heapol/czaa064>
- DetikTravel. (2025). Survei agen bus sepi penumpang setelah kebijakan larangan study tour.
- Dunn, W. N. (2018). Pengantar analisis kebijakan publik (Edi. ke-5, diterjemahkan Samodra Wibawa dkk.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing public policy* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (2nd ed.). Toronto: Oxford University Press
- Hamidah, D. (2020). Kebijakan pendidikan dalam kebijakan publik. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 9(1). <https://doi.org/10.37755/jsap.v9i1.250>
- Ji, Y. (2024). A methodological exploration of document analysis as a qualitative research method. *Korean Association for Qualitative Inquiry*. Retrieved from <https://consensus.app/papers/a-methodological-exploration-of-document-analysis-as-a-ji/95a56ddfe9d958dabf7d0ab88fa1d2b0/>
- Kingdon, J. W. (2011). *Agendas, alternatives, and public policies* (2nd ed.). New York, NY: Longman.
- Linder, S. H., & Peters, B. G. (1989). Instruments of government: Perceptions and contexts. *Journal of Public Policy*, 9(1), 35–58. <https://doi.org/10.1017/S0143814X00007960>
- Merdeka.com. (2025). Protes siswa kehilangan kunjungan edukatif. Retrieved from <https://www.merdeka.com/>
- Morgan, H. (2022). Conducting a qualitative document analysis. *The Qualitative Report*, 27(2). <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044>
- Muhammad Yulian AlRikri, Uswah Arnisiyi, Yumna Nur Azizah, Syaiman Noerikhsan A., Nikmatul Mawaddah, & Ahmad TauRiqul Hakim. (2025). Evaluasi kebijakan publik: Pengertian, teori dan karakteristik. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 29–33. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.316>

- Ndari, S. W., Suroso, & Pramudiana, I. D. (2023). Evaluasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam rangka meningkatnya kunjungan wisatawan di Pantai Tambakrejo Kabupaten Blitar. *Soetomo Administrasi Publik*, 465–476. Retrieved from <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/view/7262>
- Nugroho, A. (2025, Juni 3). Soal larangan study tour, Puspar UGM dorong pasar wisata baru kelompok minat khusus. Universitas Gadjah Mada. Retrieved from <https://ugm.ac.id/id/berita/soal-larangan-study-tour-puspar-ugm-dorong-pasar-wisata-baru-kelompok-minat-khusus/>
- Nugroho, R. (2018). *Public policy* (Rev. ed., edisi ke-6). Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Komite Nasional Keselamatan Transportasi. (2024). Laporan semester II tahun 2024. Jakarta: KNKT. Retrieved from <https://knkt.go.id/dokumen/downloadRilebyname?Extension=.pdf&FileName=LAPORAN+SEMESTER+II+TAHUN+2024.pdf&ID=95e8cd61-8832-4fa2-a9c3-c54dba1de7af>
- Kompas.com. (2024, Mei 12). KNKT investigasi kecelakaan bus rombongan siswa di Subang, fokus pada sistem pengereman. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/12/23064071/knkt-investigasi-kecelakaan-bus-rombongan-siswa-di-subang-fokus-pada>
- Kompasiana. (2025, Juni 21). Study tour Jawa Barat: ancaman bagi transportasi, UMKM dan pendidikan. Retrieved from <https://kompasiana.com/>
- Radar Bandung. (2025, Maret 3). Kontroversi larangan study tour di Jawa Barat, pengusaha pariwisata Sumedang meradang. Radar Bandung (Sumedang). Retrieved from <https://sumedang.radarbandung.id/berita-utama/2025/03/03/kontroversi-larangan-study-tour-di-jawa-barat-pengusaha-pariwisata-sumedang-meradang/>
- Republika. (2024, Mei 12). Pemerintah diimbau buat peraturan yang memperketat izin study tour. Republika. Retrieved from <https://news.republika.co.id/berita/sddh0t425/pemerintah-diimbau-buat-peraturan-yang-memperketat-izin-study-tour-sekolah>
- RRI. (2025, Juni). Pengelola wisata desak pemerintah evaluasi larangan study tour. RRI.co.id. Retrieved from <https://rri.co.id/wisata/1559669/pengelola-wisata-desak-pemerintah-evaluasi-larangan-study-tour>
- Saing, P. E., & Sinurat, J. Y. (2024). Analisis program study tour wisata sejarah sebagai sumber belajar pada siswa di SMA Negeri 2 Kota Jambi. *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah*, 3(1), 203–212. <https://doi.org/10.22437/krinok.v3i1.25865>
- Semuel, O. W., Kawatak, S. Y., Indriyanto, M. N., & Merentek, M. E. G. (2023). Dampak ekonomi pemberdayaan masyarakat pada destinasi wisata edukasi Tuur Maasing. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1), 346–356. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2444>
- Sudrajat, T., Syah, M., & Erihadiana, M. (2021). Kontribusi teori kebijakan publik terhadap studi manajemen pendidikan Islam. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1). <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v8i1.5178>

Tempo.co. (2025, Juni 26). Mendikdasmen minta sekolah pastikan kualitas transportasi untuk study tour. Tempo.co. Retrieved from <https://www.tempo.co/politik/mendikdasmen-minta-sekolah-pastikan-kualitas-transportasi-untuk-study-tour>

Tribunnews.com – Bangka. (2024, Mei 25). Viral: bus rombongan study tour SDN 1 Harisan Jaya di OKU Timur terbalik, 2 tewas, puluhan luka-luka. Tribunnews.com. Retrieved from <https://bangka.tribunnews.com/2024/05/25/viral-bus-rombongan-study-tour-sdn-1-harisan-jaya-di-oku-timur-terbalik-2-tewas-puluhan-luka-luka?page=all>